



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KECAMATAN KLAMBU

Jl. Raya Klambu – Kudus No. 30 Telp. (0292) 7702858

KLAMBU (58154)

KEPUTUSAN KECAMATAN KLAMBU

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 051.2/ I /I /2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2025

KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan indikator yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Sekretariat daerah Kabupaten Grobogan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tahun 2025.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
- KELIMA : Keputusan Camat Klambu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klambu
Pada tanggal, 2 Januari, 2025



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 051.2/ I / I /2025
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN
GROBOGAN

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan : Pembantu Bupati dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Kecamatan
3. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
4. Fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

CAMAT KLAMBU



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN CAMAT KLAMBU
 KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR 051.2/ I /I /2025
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
 (IKU) KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN
 GROBOGAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025**

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SAT.	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN	PENANGGUNGJAWAB
I.	Meningkatkan kapasitas SDM sarana dan Prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	%	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100.	Indikator ini dipilih sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan pemerintah dalam mewujudkan <i>good governance</i> dan manajemen kinerja yang berorientasi hasil.	Camat
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai LPPD	Nilai	Laporan Hasil Penilaian LPPD oleh Kemendagri	LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja	Camat

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SAT.	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN	PENANGGUNGJAWAB
					penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.	
A.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	%			
a.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	kali			
a.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintah dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	kali			

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SAT.	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN	PENANGGUNGJAWAB
B.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	%	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100.		
b.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat sasaran	%	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dikali 100.		
b.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dikali 100.		
b.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100		
b.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	bulan	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersusun Tepat Waktu		

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SAT.	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN	PENANGGUNGJAWAB
b.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	%	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100		
b.3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Terpenuhi		
b.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100		
b.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	unit	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhi		
b.4.2.	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Unit	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhi		
b.4.3.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	unit	Jumlah Penyediaan Bahan/Material Terpenuhi		
b.4.4.	Penyelenggaraan rapat	Jumlah Rapat	kali	Jumlah Penyelenggaraan		

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SAT.	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN	PENANGGUNGJAWAB
	koordinasi dan konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terlaksana		
b.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100		
b.5.1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpenuhi		
b.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa		
b.6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	Bulan	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhi		
b.6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhi		

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SAT.	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN	PENANGGUNGJAWAB
b.6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhi		
b.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	Jumlah peralatan kantor kecamatan terpelihara dengan baik		
b.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	Unit	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpenuhi		
b.7.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksana		
b.7.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpenuhi		

